
KEBIJAKAN PRESIDEN DONALD TRUMP TERHADAP BRAINDRAINER DI AMERIKA SERIKAT

Muhammad Akbar¹

***Abstract:** The H-1B visa reform policy under President Barack Obama's leadership in 2014 has increased the wave of braindrainer migration during the period 2014 to 2016, which gave rise to criticism from several parties and became a political economy discussion in the United States. Donald Trump ran as a Candidate for President of the United States in the 2016 election and promised a policy of reforming the H-1B visa with a selective mechanism that was more pro-American during his term of office. By using qualitative analysis techniques and collecting primary and secondary data based on archives, documents and the internet through mass media reporting, this research in the form of descriptive case study research explains the policies of President Donald Trump and his administration in reforming the H-1B visa immigration policy in the categories of merit and skills-based worker migration (braindrainer). This research focuses on looking at Donald Trump's H-1B reform policy during his term as President of the United States (2017-2021) which is divided periodically. The result of the research showed that President Donald Trump's policy in reforming the H-1B visa through the "Buy American Hire American" executive order tends to be restrictive by creating procedural policies and administrative memoranda policies which cause the denial rate for braindrainers' acceptance and extension of work period petitions to increase significantly. Many of these rules and policies are not in accordance with legally applicable standard rules, so that many companies who feel disadvantaged by this policy file lawsuits against the government which results in the revocation of rules and policies that are not in accordance with the initial standards regulated in law.*

Keywords: Immigration, Policy, H-1B Visas, United States.

Pendahuluan

Amerika Serikat merupakan negara dengan julukan Land of Freedom yang menawarkan kesempatan berkarir yang sangat prospektif serta keterbukaan bagi para pendatang dari berbagai negara. Dengan basis ekonomi yang sangat kuat, Amerika Serikat menjadi home-based bagi banyak perusahaan ternama seperti Google, Apple, Amazone, dan banyak perusahaan besar lainnya sehingga membuka lapangan kerja yang sangat luas dan variatif dengan penghasilan yang menarik. Keterbukaan Amerika Serikat dicerminkan melalui kebijakan imigrasi yang ramah bagi para pendatang dari luar negeri. Kedua hal tersebut menjadikan banyak orang dari luar Amerika Serikat yang datang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, berbisnis, dan bersekolah. Pekerja dan pelajar dari luar negeri yang berdatangan ke Amerika Serikat kemudian memunculkan fenomena brain drain.

Brain drain adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ketika individu yang sangat terampil, terpelajar, dan berbakat pindah dari negara asal mereka ke negara lain untuk mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik (GILLIAN BROCK, 2015). Globalisasi telah membuat arus brain drain menjadi lebih pesat dengan perkembangan teknologi transportasi yang memudahkan masyarakat

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : mhmd.akbar0510@gmail.com

internasional untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya (ALEJANDRO PORTES, 2013). Negara asal atau country of origin pada fenomena brain drain adalah negara-negara dengan demografi yang tinggi serta negara-negara berkembang. Sedangkan, negara tujuan atau country of purpose adalah negara-negara maju dengan tingkat ekonomi dan teknologi yang tinggi.

Dalam fenomena brain drain, terdapat istilah populer yang disebut *braindrainer*. *Braindrainer* merupakan kelompok orang-orang dengan ciri-ciri memiliki keterampilan khusus yang istimewa pada bidang tertentu dan memiliki gelar pendidikan tinggi. Para *braindrainer* umumnya berpindah sebagai pekerja pada spesialisasi khusus atau sebagai pelajar yang mengenyam pendidikan tinggi di negara tujuan, kemudian mereka bekerja di negara tersebut setelah lulus.

Kelompok *braindrainer* masuk ke Amerika Serikat melalui visa H-1B. Dalam sistem keimigrasian Amerika Serikat, visa H-1B merupakan kategori visa khusus untuk golongan pekerja yang memiliki spesialisasi pada bidang tertentu yang membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi serta gelar pendidikan sarjana (Minimal S1/undergraduated) (ANDERSON, 2021).

Pada tahun 2014, perusahaan-perusahaan IT di Amerika Serikat meminta Presiden Barack Obama agar dapat melakukan reformasi kebijakan visa H-1B untuk meningkatkan minat para *braindrainer* dari berbagai negara agar dapat bekerja di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama kemudian melakukan reformasi tersebut diantaranya berupa kebijakan untuk mengizinkan pasangan pemegang visa H-1B untuk mencari pekerjaan, menarik talenta profesional terbaik dunia melalui pedoman L-1 (transfer pekerja berketerampilan tinggi dari luar negeri), Memperbarui Program OPT STEM (pelatihan kerja) yang mempertahankan lulusan perguruan tinggi Amerika Serikat untuk mendapatkan pengalaman bekerja di AS, modernisasi dan penyederhanaan sistem keimigrasian, serta mempermudah pendaftaran green card bagi pemegang visa H-1B agar mereka dapat tinggal dan menetap di Amerika Serikat (CECILIA MUNOZ, 2016).

Hasil dari kebijakan tersebut mempengaruhi jumlah *braindrainer* pemegang visa H-1B yang masuk ke Amerika Serikat di tahun 2014–2016 pada periode kebijakan Pemerintahan Presiden Barack Obama.

Data Pendaftar dan Penerima visa H-1B tahun 2014 – 2016

Pendaftaran dan Persetujuan	Tahun Fiskal		
	2014	2015	2016
Pendaftaran	325,971	368,852	399,349
Persetujuan	259,812	307,129	348,162

Sumber Data: USCIS (U.S Citizenship and Immigration Services)/Number of H-1B Petition Fillings.

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah *braindrainer* yang masuk baik dari segi pendaftaran maupun penerimaan. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa kebijakan reformasi visa H-1B Presiden Barack Obama menghasilkan gelombang penerimaan yang besar terhadap pendaftar serta penerima visa H-1B dalam periode tahun 2014-2016.

Reformasi kebijakan visa H-1B oleh Presiden Barack Obama yang menyebabkan peningkatan jumlah *braindrainer* yang masuk ke Amerika Serikat

memicu kritik dari kalangan politisi hingga pakar ekonomi AS. Kritik tersebut muncul akibat pemerintah dianggap menyalahgunakan visa H-1B dengan melakukan outsourcing tenaga kerja secara luas yang berpengaruh pada berkurangnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, perusahaan yang merekrut *braindrainer* dari luar negeri cenderung membayar dengan gaji yang lebih rendah daripada gaji yang dibayarkan kepada pekerja lokal Amerika Serikat. Alih-alih mendatangkan tenaga kerja yang terampil, kebijakan ini justru memperburuk prospek pekerjaan dan pendapatan bagi para pekerja lokal Amerika Serikat (TORRESR, 2017).

Sorotan terhadap reformasi kebijakan visa H-1B yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama memicu respon dari Lembaga legislatif Amerika Serikat. Pada tahun 2015, senat-senat dari partai republik secara teratur mengkritik visa H-1B dan eksistensi *braindrainer* di masa kepemimpinan Presiden Obama, memunculkan terbentuknya RUU American Job First Act. Tujuan akhir dari rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menurunkan bahkan mengakhiri minat para *braindrainer* untuk bekerja di Amerika Serikat (ANDERSON, 2021).

Donald Trump yang mencalonkan diri pada pemilu AS 2016 terus mengkritik kebijakan Presiden Barack Obama yang telah meningkatkan masuknya para *braindrainer* ke Amerika Serikat karena dianggap mengurangi lowongan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja lokal. Kritik tersebut juga diberikan kepada banyak perusahaan terutama yang bergerak di sektor TI karena merekrut terlalu banyak *braindrainer* daripada mempekerjakan warga Amerika. Hal tersebut mendorong Donald Trump untuk merencanakan kebijakan reformasi H-1B yang berbeda dari kebijakan Presiden Barack Obama untuk melindungi kepentingan ekonomi dan pekerja Amerika Serikat.

Dalam rencana kebijakan reformasinya terhadap visa H-1B, Donald Trump tidak menolak kedatangan dan keberadaan para *braindrainer* di Amerika Serikat, ia lebih menginginkan reformasi yang lebih selektif dengan menerima *braindrainer* yang memiliki kualifikasi lebih berpengalaman dan lebih profesional dalam mengisi pekerjaan-pekerjaan di Amerika Serikat. Namun faktanya, kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinannya justru sangat kontradiktif dalam implementasinya, sehingga kebijakan reformasi tersebut cenderung mengarah kepada kebijakan yang restriktif terhadap *braindrainer*, kebijakan reformasi H-1B Donald Trump lebih berupaya untuk mengurangi jumlah *braindrainer* yang masuk ke Amerika Serikat tanpa memandang kualifikasi yang spesifik. Kebijakan reformasi ini berdampak pada kerugian bagi banyak perusahaan yang membutuhkan para *braindrainer*, terutama perusahaan-perusahaan TI Amerika Serikat. Kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan dan menjadi kontroversi bagi banyak pihak, sehingga menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan kebijakan ini secara lebih mendalam.

Kerangka Teori

Konsep Kebijakan Imigrasi Internasional

Dalam melihat fenomena migrasi internasional melalui dimensi politik, penelitian ini akan menggunakan pemikiran dari Eytan Meyers, seorang ilmuwan yang menjelaskan migrasi internasional dalam dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam jurnalnya yang berjudul *Theories of International Immigration Policies – A Comparative Analysis* di tahun 2000, Eytan Meyers menjelaskan bahwa kebijakan kontrol imigrasi merupakan bagian yang sangat krusial dalam menentukan pola serta proses imigrasi yang terjadi, terutama pada negara-negara penerima. Pola migrasi

internasional dimana banyak orang-orang dari berbagai negara datang menuju negara-negara industri akibat alasan ekonomi dan politik cukup mempengaruhi stabilitas dan perkembangan populasi di banyak negara barat (MEYERS, 2000).

Studi empiris yang berkembang berusaha untuk menjelaskan kebijakan imigrasi dalam proses pembuatan serta efektivitas penerapannya. Hasilnya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kebijakan kontrol imigrasi. Pendekatan tersebut diantaranya adalah Pendekatan Marxisme, Pendekatan Identitas Nasional, Pendekatan Politik Domestik, Pendekatan Institusional, Pendekatan Realisme, dan Pendekatan Liberalisme (MEYERS, 2000). Berbagai pendekatan tersebut menjelaskan mengenai keputusan negara dalam mengambil kebijakan kontrol imigrasi mengenai kapan, siapa, dan tipe imigran seperti apa yang dapat diterima/ditolak oleh suatu negara.

Pendekatan-pendekatan tersebut juga berkontribusi terhadap pemahaman mengenai karakteristik kebijakan terhadap imigrasi secara prosedural yang lebih spesifik. Pendekatan marxisme memprediksi korelasi jangka pendek antara siklus ekonomi dengan kebijakan imigrasi, yang secara khusus menyoroti kebijakan terhadap migran pekerja dan kasus imigran ilegal. Pendekatan Identitas Nasional menyoroti mengenai pengalaman sejarah, budaya, dan konflik sosial yang telah membentuk kebijakan imigrasi di masa lalu dan saat ini. Pendekatan Politik Domestik merujuk pada faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam negeri yang membentuk kebijakan imigrasi. Pendekatan institusional, menyoroti seluk-beluk proses yang dibuat oleh administrasi/birokrasi negara yang membentuk kebijakan imigrasi, hal ini terutama terlihat dalam proses kebijakan terhadap pengungsi dan pekerja migran. Pendekatan Realisme yang berfokus pada bagaimana konflik antar negara dapat mempengaruhi kebijakan imigrasi. Pendekatan liberalisme yang berfokus pada bagaimana kebijakan kerjasama dan keterbukaan antarnegara mempengaruhi pengambilan keputusan dalam imigrasi.

Penelitian ini akan menggunakan konsep pengendalian imigrasi melalui pendekatan politik domestik dan pendekatan institusional dalam melihat bagaimana kebijakan Donald Trump terhadap *braindrainer* di Amerika Serikat.

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diadaptasi dari pemikiran Meyers (2000)/ *Theories of International Immigration Policies – A Comparative Analysis*

Pendekatan politik domestik digunakan untuk melihat pembentukan kebijakan melalui faktor ekonomi yang dimana dalam hal ini Donald Trump berusaha untuk membentuk kebijakan pengendalian imigrasi demi melindungi kepentingan para pekerja lokal Amerika Serikat. Pendekatan Institusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses kebijakan Donald Trump terhadap *braindrainer* secara prosedural melalui administrasi dan institusi yang bertanggung jawab terhadap proses imigrasi dan ketenagakerjaan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan kebijakan Presiden Donald Trump terhadap *braindrainer* di Amerika Serikat pada saat kepemimpinannya dalam skala waktu 2017–2021. Jenis data yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah jenis data sekunder, sumber data yang digunakan berupa buku, jurnal, berita, laporan penelitian, thesis, hingga artikel opini yang memiliki keterkaitan dengan masalah *braindrainer* di Amerika Serikat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik studi pustaka (Library Research) yang dikumpulkan dari berbagai sumber data yang ada dan dikumpulkan agar sesuai dengan target penulisan. Teknik analisis data pada dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi *Braindrainer* di Amerika Serikat

Di era globalisasi, Amerika Serikat telah menerima banyak kedatangan imigran berbasis pekerjaan dari berbagai negara. AS secara khusus telah membagi imigran pekerja ke dalam beberapa kategori visa khusus, salah satunya adalah visa H-1B. Visa H-1B merupakan jenis visa yang dikeluarkan oleh sistem keimigrasian Amerika Serikat atau yang dikenal dengan USCIS yang mengizinkan para pemberi kerja (pihak perusahaan di Amerika Serikat) untuk mempekerjakan para tenaga asing terampil dari berbagai negara untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (temporer), umumnya dalam periode waktu 3-6 tahun. Visa ini menjadi pintu masuk bagi para *braindrainer* dari berbagai negara untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat.

Kesimpulan

Visa khusus *braindrainer* ini bermula dari undang-undang McCarren-Walter tahun 1952. Pada tanggal 27 Juni 1952, kongres AS mengesahkan undang-undang imigrasi dan kebangsaan yang mengkodifikasikan undang-undang mengenai imigrasi, naturalisasi, dan kewarganegaraan Amerika Serikat menjadi undang-undang yang permanen. Beberapa jenis kategori visa dibuat, salah satunya adalah visa H-1, yang mengkategorikan warga asing berbasis prestasi dan kemampuan istimewa untuk bekerja sementara di Amerika Serikat. Visa H-1 memperkenalkan sistem imigrasi selektif dengan memberikan preferensi khusus kepada pekerja asing dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan di negara tersebut. Visa ini disebut sebagai visa H-1 karena telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan pasal 101(15)(H)(1) undang-undang imigrasi dan kebangsaan.

Selanjutnya pada tahun 1990, undang-undang imigrasi Amerika Serikat memecah kategorisasi visa H-1 menjadi visa H-1A dan visa H-1B. Visa H-1A merupakan visa khusus yang dikategorisasikan untuk perawat, sedangkan visa H-1B dikategorisasikan khusus untuk para *braindrainer*. Pemecahan tersebut dilakukan untuk melakukan spesifikasi daftar jenis pekerjaan warga khusus asing dan mengatur jumlah orang-orang yang masuk ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk bekerja. Visa H-1B secara khusus menambahkan kualifikasi gelar sarjana yang tinggi setelah sebelumnya hanya menyebutkan prestasi dan kemampuan khusus. Visa H-1B ini merupakan langkah bagi sistem keimigrasian Amerika Serikat untuk memenuhi daftar pekerjaan di wilayah-wilayah AS yang kekurangan tenaga kerja terampil.

Sejak visa H-1B menjadi golongan baru dalam kategorisasi imigran di Amerika Serikat, eksistensi *braindrainer* telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan ekonomi serta teknologi di AS hingga saat ini. Dalam laporan American Immigration Council yang dipublikasi pada bulan Juli 2023, terdapat 5 dampak positif dari eksistensi *braindrainer* yang telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Amerika Serikat, diantaranya:

- 1.) Skillset para *braindrainer* sangat luas sehingga dapat mengisi berbagai jenis pekerjaan di dalam pasar kerja Amerika Serikat sehingga mengurangi adanya persaingan pada jenis pekerjaan yang sama.
- 2.) *braindrainer* menggunakan penghasilan mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian Amerika Serikat sehingga meningkatkan consumer demands serta meningkatkan produktivitas dalam roda perekonomian AS.
- 3.) *Braindrainer* membantu strategi dan pengelolaan bisnis di dalam perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk memperluas operasi mereka secara domestik daripada mencari peluang baru di luar negeri.
- 4.) Banyak *braindrainer* yang berhasil membuka perusahaannya sendiri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, hal tersebut dapat memperluas pasar kerja di Amerika Serikat.
- 5.) Ide dan inovasi baru yang dikembangkan oleh para *braindrainer* telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta teknologi di Amerika Serikat.

Sorotan Permasalahan *Braindrainer* di Amerika Serikat

Reformasi kebijakan yang diterapkan meningkatkan gelombang migrasi *braindrainer* yang masuk ke Amerika Serikat selama periode jabatan Presiden Barack Obama di tahun 2014-2016. Kenaikan jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi daftar pekerjaan di beberapa wilayah Amerika Serikat yang kekurangan tenaga kerja terampil serta meningkatkan produktivitas serta inovasi di berbagai perusahaan. Akan tetapi, kebijakan reformasi tersebut justru memicu banyak kritikan dari banyak politisi, pakar ekonomi dan bisnis, serta mengundang perbincangan publik dari berbagai kalangan hingga menjadi diskusi dan topik politik dan ekonomi yang cukup populer dalam pemberitaan nasional dan sorotan di media massa Amerika Serikat.

Diskusi yang muncul banyak membahas tentang kebijakan reformasi Barack Obama yang dianggap terlalu bergantung kepada *braindrainer* terutama dalam sektor-sektor pekerjaan yang terkait dengan teknologi dan komputer. Banyak pihak yang berpendapat bahwa Barack Obama lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan masyarakat dalam hal pekerjaan. Kebijakan reformasi ini dianggap oleh kaum proteksionis Amerika Serikat sebagai penyelewengan dan tidak

sesuai dengan aturan karena gelombang masuknya *braindrainer* ke Amerika Serikat pasca kebijakan diterapkan dinilai telah melebihi batas wajar.

Permasalahan tersebut tentunya disoroti oleh partai oposisi pemerintah saat itu yakni partai republik, salah satu partai besar di Amerika Serikat yang pada dasarnya sangat konservatif terhadap imigran. Partai republik gencar menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama dalam kebijakan imigrasi, termasuk secara khusus mengkritik tentang kebijakan reformasi H-1B. Beberapa anggota partai tersebut percaya bahwa kebijakan H-1B Presiden Obama terlalu meliberalisasi program H-1B sehingga dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Akibatnya, banyak tenaga kerja lokal yang kalah saing serta munculnya gap yang cukup signifikan dalam upah pekerja.

Permasalahan reformasi kebijakan tersebut juga disoroti dalam kongres Amerika Serikat. Senator dari partai republik yaitu Ted Cruz dan Jeff Sessions pada tahun 2015 memperkenalkan rancangan undang-undang khusus sebagai respon atas kebijakan reformasi Presiden Barack Obama. Rancangan undang-undang American Job First Act bill atau yang dikenal dengan Cruz-Sessions bill memiliki 4 poin kebijakan utama dalam rangka untuk mengurangi mobilitas *braindrainer* di Amerika Serikat. Pertama, para kandidat calon penerima visa H-1B yang memiliki gelar sarjana atau magister wajib bekerja di perusahaan AS pihak ketiga yang ada di luar Amerika Serikat selama 10 tahun sebelum mendapatkan status sebagai pekerja H-1B dan bekerja di Amerika Serikat. Kedua, RUU ini akan menghapuskan sistem Pelatihan Praktik Opsional (OPT) yang memperbolehkan pelajar untuk bekerja di Amerika Serikat setelah mereka lulus. Ketiga, menerapkan gaji minimum yang tinggi kepada perusahaan yang menyewa para *braindrainer* dengan standar upah \$110.000 per-tahun. Keempat, mempermudah pekerja lokal Amerika Serikat untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan karena diskriminasi (terutama pada upah karyawan).

Rancangan undang-undang tersebut tidak kunjung mendapatkan persetujuan akibat banyak anggota dari partai demokrat enggan menandatangani undang-undang partai republik di dalam kongres karena banyak menyerang tindakan eksekutif Presiden Obama mengenai imigrasi. Meskipun demikian, partai republik tidak mundur dalam mengadvokasikan kepentingannya dalam pengendalian gelombang imigrasi. Donald Trump kemudian menjadi tokoh politisi yang dipilih dari partai republik untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat pada pemilu 2016 dengan membawa kepentingan partai republik untuk mengatasi persoalan-persoalan imigrasi AS yang dianggap bermasalah termasuk persoalan imigrasi *braindrainer*.

Kebijakan Presiden Trump terhadap *braindrainer* di AS

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Trump telah membuat langkah-langkah kebijakan terhadap permasalahan imigrasi, khususnya terhadap para *braindrainer* yang masuk ke Amerika Serikat. Rancangan undang-undang American Job First Act memberikan garis besar rencana tindakan Trump dalam menangani permasalahan H-1B melalui kebijakan reformasi. Berikut ini adalah langkah-langkah reformasi kebijakan Presiden Trump terhadap *braindrainer* selama menjabat sebagai presiden AS dalam periode tahun 2017-2021.

1. Kampanye Donald Trump

Kampanye menjadi langkah awal bagi Donald Trump untuk menyuarakan permasalahan imigrasi, termasuk migrasi *braindrainer* dalam program visa H-1B. Donald Trump menggunakan *braindrainer* sebagai salah

satu focal point yang dipermasalahkan dalam isu imigrasi di Amerika Serikat dengan mempromosikan kebijakan reformasi H-1B yang lebih selektif sebagai janji politiknya. Janji politik tersebut merupakan dasar bagi Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan bagi para *braindrainer* dan pemegang visa H-1B di masa kepemimpinannya.

Selama masa kampanye pemilihan presiden AS 2016, Donald Trump melakukan promosi kebijakan dengan menekankan kebutuhan untuk mereformasi program Visa H-1B. Beberapa cara yang digunakannya untuk mempromosikan kebijakan reformasi H-1B antara lain:

1. Kritik terhadap Reformasi H-1B oleh Presiden Obama: Donald Trump banyak menyoroti kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Presiden Barack Obama, termasuk salah satunya mengkritik program reformasi visa H-1B. Donald Trump mengkritik kebijakan tersebut karena akan membuat perusahaan-perusahaan AS memanfaatkannya untuk menggantikan pekerja Amerika dengan pekerja asing dengan bayaran yang lebih rendah.
2. Penyesuaian Upah: Salah satu proposal yang diajukan Donald Trump adalah penyesuaian gaji minimum untuk pekerja yang menggunakan Visa H-1B. Dengan menaikkan ambang batas gaji, Trump akan berusaha memastikan bahwa pekerja asing tidak dapat dipekerjakan dengan gaji yang lebih rendah daripada pekerja Amerika.
3. Prioritas Pekerja Amerika: Trump menekankan prinsip "American First" dan berjanji untuk memberikan prioritas kepada pekerja Amerika dalam hal pekerjaan. Dia menyatakan niatnya untuk melindungi pekerja domestik dan mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal sebelum mencari pekerja asing.
4. Audit Program H-1B: Trump berjanji untuk melakukan audit menyeluruh terhadap program H-1B untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan yang seharusnya.

Presiden Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat ke-45 yang berhasil memenangkan pemilihan presiden AS yang diselenggarakan pada tahun 2016. Trump menjadi kandidat presiden terpilih yang berasal dari partai Republik, mengalahkan Hillary Clinton yang berasal dari partai demokrat. Presiden Donald Trump mulai menjabat di tahun 2017 hingga 2021 dan telah membuat kebijakan yang cukup evolusioner terhadap sistem keimigrasian Amerika Serikat terutama dalam program visa H-1B sesuai dengan janji politiknya pada masa kampanye.

2. Kebijakan Reformasi H-1B di Awal Administrasi Donald Trump

Setelah Presiden Donald Trump resmi terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2017–2021, Trump mulai menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk mengisi posisi-posisi penting dalam sistem keimigrasian Amerika Serikat (USCIS). Mereka yang ditunjuk merupakan orang-orang yang pernah bekerja untuk senator Jeff Sessions dan orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi anti imigrasi. Orang-orang tersebut dipilih oleh Presiden Trump untuk

mendukung proses kebijakannya terhadap *braindrainer* hingga akhir masa jabatan.

Pada tanggal 18 April 2017, Presiden Donald Trump secara resmi mengeluarkan perintah eksekutifnya terhadap *braindrainer*, perintah eksekutif tersebut adalah Buy American and Hire American: Putting American Workers First (dokumen lengkap dapat dilihat pada lampiran 2). Tujuan dari pengeluarkan perintah eksekutif ini adalah kepentingan ekonomi untuk melindungi pekerja Amerika Serikat serta menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan *braindrainer* oleh pihak manapun. Perintah eksekutif ini merupakan cetak biru dari undang-undang American Job First yang sebelumnya gagal diterapkan. Segera setelah perintah eksekutif tersebut dikeluarkan, USCIS mulai bekerja dengan kombinasi antara pengambilan keputusan, kebijakan melalui memo, dan perubahan operasional untuk mengimplementasikan perintah eksekutif Presiden Donald Trump.

Di dalam dokumen perintah eksekutif Buy American Hire American, terdapat 4 kebijakan memo yang dikeluarkan oleh USCIS dalam program visa H-1B. Kebijakan memo tersebut dijelaskan sebagai berikut

- 1.) USCIS menambahkan kualifikasi untuk menegaskan hubungan antara “pemberi kerja” dan “penerima manfaat” dengan memberikan bukti kontrak kerja yang valid antara kedua belah pihak maupun dengan perusahaan pihak ketiga dalam dokumen pendaftaran.
- 2.) Memo kebijakan mengenai transfer pekerja L-1 (*braindrainer* yang bekerja di perusahaan AS cabang luar negeri), USCIS melakukan kontrol terhadap proxy votes yang menunjukkan adanya keterikatan antara *braindrainer*, perusahaan asal, dan perusahaan tujuan di AS yang tidak dapat dicabut setelah panduan sebelumnya tidak mengklarifikasi mengenai proxy votes dalam menerapkan kontrol.
- 3.) Kebijakan memo mengenai spesifikasi pekerjaan khusus, dimana pekerjaan yang tertulis di dalam kontrak antara perusahaan dan *braindrainer* harus sesuai dengan kemampuan teknis dan gelar sarjana yang dimiliki sesuai dengan pengajuan petisi.
- 4.) Kebijakan memo untuk menerapkan pembayaran yang tinggi terhadap pengajuan petisi visa H-1B, biaya tersebut akan digunakan untuk melatih pekerja lokal US sesuai dengan perintah eksekutif.

Pada awal administrasi, Presiden Trump dan USCIS bahkan telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan terhadap *braindrainer* secara tersembunyi sebelum perintah eksekutif dikeluarkan melalui implementasi memo yang dibuat pada 31 maret 2017 dengan judul Guidance Memo on H-1B Computer-related-positions yang mengintruksikan kepada para juri USCIS untuk menolak banyak pekerjaan terkait komputer karena sesuai dengan panduan pandangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (DOL), tidak semua orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan tersebut memerlukan gelar sarjana yang tinggi, sehingga perusahaan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan komputer harus lebih memprioritaskan pekerja lokal AS. Dokumen ini merupakan sebuah kebijakan rahasia USCIS dibawah Presiden Trump sebelum akhirnya dirilis ke publik setelah melewati gugatan Freedom of Information Act (FOIA).

Semenjak perintah eksekutif dikeluarkan, banyak perubahan dramatis yang mempengaruhi nasib para *braindrainer* dalam pengajuan maupun perpanjangan visa H-1B. USCIS juga mulai memperketat birokrasi dalam sistem imigrasi visa H-1B. Sebuah dokumen berjudul H-1B RFE Standards yang dikeluarkan pada maret 2017 secara signifikan berpengaruh pada permintaan Request of Evidence (Sebuah dokumen yang wajib dikeluarkan ketika pendaftar visa H-1B memiliki dokumen persyaratan yang hilang atau tidak valid) dengan biaya yang lebih mahal dan proses pembuatan yang memakan waktu lebih panjang. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk memperlambat dan mempersulit proses penerimaan *braindrainer* melalui visa H-1B.

Dokumen berikutnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2017 yaitu H-1B AC21 Denial Standards, dokumen ini berisi banyak bagian standar penolakan yang ditambahkan dan disunting untuk mempengaruhi keputusan juri H-1B dalam memutuskan proses penerimaan *braindrainer* dalam mendapatkan visa H-1B.

3. Kebijakan Reformasi H-1B Bertahap (2017-2019)

Kebijakan reformasi terhadap visa H-1B terus dilakukan oleh USCIS dibawah kepemimpinan Presiden Trump selama masa jabatannya. Kebijakan reformasi bertahap dimulai sejak bulan oktober 2017 saat L. Francis Cissna ditunjuk sebagai direktur baru USCIS oleh Presiden Trump. Cissna langsung mengeluarkan memo kebijakan untuk kasus perpanjangan visa H-1B dan pendaftaran green card. Memo kebijakan tersebut berisi panduan bagi para juri USCIS untuk lebih tegas dalam mengadili perpanjangan visa dan pendaftaran green card dengan banyak menambahkan syarat dan kualifikasi *approval* yang berbeda dari proses sebelumnya. Hasilnya, banyak *braindrainer* yang tidak berhasil memperpanjang visa mereka dan banyak pendaftaran green card yang ditolak sehingga harus kembali ke negara mereka.

Selanjutnya, Pada tahun 2018, USCIS kembali menambahkan kebijakan prosedural terhadap visa H-1B. Seluruh aplikasi visa H-1B yang ditolak selama prosedur imigrasi akan ditempatkan pada proses pendeportasian, tidak hanya bagi pendaftar baru, tetapi juga bagi para *braindrainer* yang gagal dalam mengajukan perpanjangan visa dan pendaftaran greencard. Selain itu, kebijakan baru ini juga mengizinkan para juri H-1B untuk menolak aplikasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi tanpa meminta RFE atau memberikan kesempatan bagi para *braindrainer* untuk melakukan perbaikan dokumen.

Dalam 3 tahun kepemimpinan Presiden Trump, USCIS terus menerapkan standar baru dalam proses administrasi program visa H-1B sesuai dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Semua memo kebijakan prosedural secara administratif telah banyak mengubah dan menyunting kalimat-kalimat kualifikasi dari standar penerimaan dan standar penolakan secara prosedural dalam pemilihan petisi visa H-1B. Hal tersebut berakibat pada penolakan dalam pendaftaran maupun perpanjangan visa H-1B.

Dalam 3 tahun pertama kepemimpinan Presiden Trump, terdapat adanya kasus penolakan terhadap petisi visa H-1B sejak awal administrasinya. Kasus penolakan tersebut dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh USCIS melalui laporan buku imigrasi tahunan Amerika Serikat. di tahun 2020.

Tingkat Penolakan Petisi Pekerja Baru

Tahun Fiskal	Tingkat Penolakan
FY 2020	13%
FY 2019	21%
FY 2018	24%
FY 2017	13%
FY 2016	10%

Sumber: USCIS/National Foundation for American Policy *FY2020

Data diatas menunjukkan presentase penolakan petisi H-1B untuk New Employment meningkat dari 13% pada tahun fiskal 2017 menjadi 24% penolakan pada tahun fiskal 2018 dan 21% penolakan pada tahun 2019. Penolakan tersebut jauh berbanding dengan penolakan petisi di kisaran tahun 2010 – 2015 di masa jabatan Presiden Obama yang hanya berkisar 5% hingga 8% per tahun fiskal.

Pemerintahan Donald Trump dan USCIS secara bertahap telah membuat kebijakan reformasi secara administrasi melalui kebijakan memo yang terus diperbarui. Dari sekian banyak memo dan kebijakan prosedural yang dikeluarkan oleh USCIS, tidak ada satupun memo yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump mengenai kualifikasi berbasis prestasi seperti yang disampaikannya pada masa kampanye. Seluruh kebijakan yang ada justru lebih restriktif tanpa memandang kualifikasi, karena bagi Presiden Donald Trump dan semua kru pemerintahannya, *braindrainer* merupakan imigran yang tidak begitu dibutuhkan di Amerika Serikat. Hal ini juga sejalan dengan orientasi kebijakannya yang lebih banyak berfokus pada permasalahan domestik.

4. Kebijakan Reformasi H-1B Puncak (2020-2021)

Setelah kebijakan administrasi bertahap, Presiden Donald Trump di akhir masa jabatannya justru lebih banyak melancarkan “perang” terhadap *braindrainer*. Pada tahap ini, kebijakan restriktifnya semakin menguat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menjadi negara yang terkena dampak virus Covid-19 secara massif, yang juga berpengaruh besar pada kebijakan-kebijakannya terkait dengan imigrasi di akhir masa kepemimpinannya.

Pada tanggal 22 juni 2020, Presiden Trump secara resmi mengeluarkan proklamasi dengan judul Proclamation Suspending Entry of Alliens Who Present a Risk to the U.S Labor Market Following the Coronavirus Outbreak yang menanggukkan masuknya petisi H-1B dan semua pemegang berbagai jenis visa (dokumen proklamasi terdapat pada lampiran 3). Proklamasi tersebut dikeluarkan berdasarkan wewenangnya pada pasal 212(f) undang-undang imigrasi dan Kebangsaan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Trump yang dikeluarkan pada April 2020

dimana Trump menengguhkan masuknya semua imigran termasuk imigran berbasis pekerjaan.

Meskipun terdapat penangguhan yang terjadi akibat Covid-19 oleh Presiden Trump terhadap seluruh pendaftar dan pemegang visa H-1B, jika mengacu pada tabel 4.1 mengenai denial rate H-1B, penolakan terhadap *braindrainer* justru menurun di tahun fiskal 2020. Penurunan tersebut tidak secara signifikan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan jumlah pendaftaran dan penerimaan visa H-1B, akan tetapi di akhir administrasi Presiden Donald Trump, seluruh memo dan kebijakan prosedural USCIS telah dibatalkan oleh pengadilan federal.

Pembatalan tersebut merupakan hasil dari adanya tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu ITServe Alliance. Perusahaan tersebut menentang kebijakan Presiden Trump akibat kerugian yang dialami oleh perusahaan mereka sebagai dampak dari banyaknya penolakan *braindrainer* yang mengurangi produktivitas bisnis. Tuntutan tersebut diajukan mulai pada tahun 2018, proses persidangan antara ITServe Alliance melawan L. Francis Cissna selaku direktur USCIS terjadi selama 2 tahun. Hasil persidangan dikeluarkan pada tanggal 03 oktober 2020, yang memenangkan perusahaan ITServe Alliance selaku penuntut. Dalam hasil tersebut, pengadilan menetapkan bahwa USCIS harus membatalkan semua memo dan kebijakan prosedural yang tidak sesuai sehingga menyebabkan penolakan terhadap visa H-1B meningkat secara drastis dalam 3 tahun terakhir.

Meskipun Presiden Trump dan USCIS gagal dalam mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir, upaya untuk melakukan restriksi terhadap visa H-1B masih terus berlanjut. Selama ini, kebijakan restriksi Presiden Trump hanya mengandalkan memo sehingga memiliki kecenderungan besar untuk mendapatkan tantangan hukum akibat aturan dan standar baru yang dibuat tanpa memiliki dasar hukum secara prosedural. Oleh sebab itu, dengan alasan urgensi pandemi Covid-19 pada tanggal 8 oktober 2020, Presiden Trump berupaya untuk memperkuat kebijakan restriktifnya dengan mengeluarkan dua peraturan besar.

Peraturan pertama dikeluarkan oleh DHS dengan nama *strengthening the H-1B program*. Peraturan ini akan mengubah regulasi terhadap berbagai aspek kualifikasi persyaratan visa H-1B melalui definisi aturan kualifikasi pengajuan legal serta kriteria yang lebih restriktif terhadap para *braindrainer*. Terdapat 4 poin krusial yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam penerimaan *braindrainer*. Pertama penafsiran “hubungan majikan-karyawan” menjadi “hubungan majikan-pelayan konvensional”, yang mengharuskan perusahaan memiliki hubungan kerja yang jelas dengan para *braindrainer*, bukan lagi bertindak sebagai “kontraktor”. Kedua, pendefinisian lokasi kerja pihak ketiga, yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap *braindrainer*. Ketiga, ketersediaan pekerjaan, yang mewajibkan perusahaan untuk membuktikan adanya kontrak kerja dengan *braindrainer*. Keempat, pendefinisian “pekerjaan khusus” yang lebih spesifik dimana pekerjaan yang dilakukan harus berhubungan langsung dengan gelar.

Bersamaan dengan peraturan oleh DHS, DOL juga mengeluarkan peraturan besar dibawah panduan Presiden Trump. Peraturan tersebut dikenal dengan *Strengthening Wage Protection for Temporary and Permanent*

Employment of Certain Aliens in the United States. Peraturan ini merevisi perhitungan tingkat upah yang dibayarkan kepada *braindrainer* harus sama dengan standar upah di AS. DOL juga merevisi tingkat upah minimum yang ditingkatkan sebesar 28% dari standar tingkat upah yang harus dibayarkan perusahaan kepada *braindrainer*. Artinya, perusahaan harus membayar lebih tinggi jika ingin merekrut para *braindrainer*.

Kedua peraturan tersebut dikeluarkan sebagai interim final, artinya peraturan tersebut berusaha mengabaikan proses yang normal dalam pengeluaran kebijakan pada umumnya. Pemerintah menganggap bahwa *braindrainer* berdampak buruk terhadap pekerja AS hingga tingkat tertentu sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan. Pengambilan 2 kebijakan tersebut dianggap pemerintah sebagai urgensi dengan alasan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada tingkat pengangguran Amerika Serikat yang semakin tinggi sehingga pengeluaran 2 kebijakan tersebut merupakan tujuan baik untuk melindungi pekerja lokal AS.

Dua peraturan besar yang dikeluarkan oleh DOL dan departemen keamanan DHS mendapatkan banyak kecaman. Kamar dagang Amerika Serikat dan beberapa Lembaga perguruan tinggi AS melakukan tuntutan hukum atas 2 kebijakan tersebut. Tuntutan hukum tersebut secara umum berisi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Trump dan USCIS terhadap Administrative Procedure Act (APA) atas 2 kebijakan yang dikeluarkan. Persidangan dilakukan sejak bulan oktober 2020 hingga desember 2020. Pengadilan menyatakan bahwa Pemerintah tidak menunjukkan tujuan baik yang dimaksud atas kebijakan yang diambil. Karena aturan di dalam APA menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dengan mengabaikan pemberitahuan dan komentar adalah kebijakan yang diambil karena sesuatu yang sangat membahayakan nyawa, harta benda, atau keselamatan publik. Dalam uji data dan fakta persidangan, data ekonomi juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi juga tidak secara signifikan merupakan dampak akibat pandemi Covid-19, sehingga urgensi pengambilan kebijakan tersebut tidak dibenarkan. Hasilnya, Pemerintah dalam hal ini DHS dan DOL dinyatakan melanggar prosedur hukum dalam pengambilan keputusan sehingga 2 keputusan tersebut harus segera dicabut.

Pada tanggal 14 januari 2021, Pemerintah AS mencoba untuk menyelamatkan aturan DOL mengenai aturan upah khusus *braindrainer*. Peraturan baru tersebut hanya sedikit mengubah beberapa bagian dari peraturan aslinya dan masih bertujuan untuk mengeluarkan pemegang visa H-1B dan imigran berbasis pekerjaan dari pasar tenaga kerja AS dengan upah minimum yang tinggi. Namun, kebijakan tersebut gagal.

Aturan terakhir Presiden Trump yang diterbitkan pada Januari 2021 juga berusaha untuk merugikan para pelajar internasional ketika memilih petisi H-1B dengan menghilangkan sistem lotere H-1B dan menggantinya dengan kriteria seleksi berdasarkan upah (gaji tertinggi hingga terendah), artinya lulusan pelajar yang menyandang gelar fresh graduate memiliki potensi penerimaan yang lebih kecil dibandingkan dengan *braindrainer* dengan pengalaman yang lebih tinggi. Hal tersebut akan menyebabkan banyak lulusan yang mendapatkan penolakan dalam pengajuan visa H-1B. Namun, di akhir administrasi Donald Trump,

semua kebijakannya terhadap *braindrainer* telah gagal diterapkan akibat dibatalkan oleh pengadilan federal.

Banyak pakar hukum serta perusahaan yang menilai bahwa kebijakan Presiden Trump terhadap visa H-1B menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan selama empat tahun terakhir selama masa jabatannya. Meskipun Donald Trump mengatakan bahwa ia menginginkan imigrasi yang “berbasis prestasi”, perang yang dilancarkan terhadap perusahaan, pelajar internasional, dan pemegang visa H-1B selama pemerintahannya menunjukkan bahwa Presiden Trump dan pemerintahannya sama sekali tidak tertarik untuk menerima para *braindrainer* di Amerika Serikat.

Simpulan

Amerika Serikat menerima para *braindrainer* melalui visa H-1B, dimana visa ini merupakan kategori visa pekerja dengan spesialisasi tertentu yang membutuhkan kemampuan tinggi dan gelar sarjana. Visa ini mengalami proses reformasi di era Presiden Barack Obama, yang memicu gelombang migrasi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan adanya pertentangan dari partai republik akibat persepsi negatif dari kenaikan jumlah *braindrainer* yang masuk ke AS. Kebijakan ini lantas dikritik oleh Donald Trump dengan menjanjikan kebijakan reformasi H-1B yang lebih pro terhadap pekerja AS.

Kebijakan reformasi Presiden Trump yang dibentuk melalui perintah eksekutif *Buy American Hire American* secara administratif telah berjalan selama empat tahun berturut-turut melalui pembuatan memo dan kebijakan prosedural dalam proses penerimaan, perpanjangan visa H-1B, hingga pengajuan *greencard*. Banyak Memo serta kebijakan prosedural yang diterapkan telah meningkatkan angka penolakan petisi yang cukup signifikan selama tahun fiskal 2017-2019. Hingga di akhir administrasi, Donald Trump mengeluarkan kebijakan reformasi melalui DHS dan DOL

Seluruh kebijakan Presiden Trump terhadap *braindrainer* yang restriktif mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak, hingga memicu adanya tuntutan hukum dari perusahaan AS yang berakhir dengan pencabutan seluruh kebijakan memo dan administratif akibat dinilai tidak sesuai dengan undang-undang dan prosedur standar visa H-1B yang menimbulkan kerugian bagi banyak perusahaan di Amerika Serikat

Daftar Pustaka

- Alejandro Portes, A. C. (2013). *Modernization for Emigration: Determination & Consequences of the Brain Drain*. In *Daedalus, Immigration & The Future of America* (pp. 170 - 184). Cambridge: The MIT Press.
- American Immigration Council. (2022). *The H-1B Visa Program and its Impact on the U.S. Economy*. Washington, D.C: American Immigration Council.
- AMERICAN IMMIGRATION LAWYERS POLICY. (2017, October 24). *Executive Action: Buy American and Hire American*. Retrieved from AILA Research Library: <https://www.aila.org/library/executive-actions-on-h-1bs>
- Anderson, S. (2021, September 17). *Judge Kills The Last Trump H-1B Rule Left Standing*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2021/09/17/judge-kills-the-last-trump-h-1b-visa-rule-left-standing/?sh=56e01a073409>

- _____. (2021, August 30). Low H-1B Visa Denial Rates Are Trump's Failed Immigration Legacy. Retrieved from Forbes.
- _____. (2021, February 01). The Story Of How Trump Officials Tried To End H-1B Visas. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2021/02/01/the-story-of-how-trump-officials-tried-to-end-h-1b-visas/?sh=6055b958173f>
- Cecilia Munoz, J. Z. (2016, January 28). the WHITE HOUSE President Barrack Obama. Retrieved from The President's Actions to Promote High-Skill Immigration: <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/28/presidents-actions-promote-high-skill-immigration>
- Douglas S. Massey, J. A. (1993). Theories of International Migration : A Review and Appraisal. In *Population and Development Review* (pp. 431 - 466). Population Council.
- _____. (1998). *Worlds in Motion : understanding international migration at the end of millenium*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. (1999, June). International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role Of the State. *Population and Development Review*, 25(2), 303-322.
- Gillian Brock, M. B. (2015). *Debating Brain Drain : May Government Restrict Emigration ?* New York: Oxford University Press.
- Jorge Lopez, E. W. (2020, November 23). Breaking Down the New DOL and DHS H-1B Rules. *Litter Insight*. Retrieved 12 28, 2023
- Kaba, A. J. (2019). United States Immigration Policies in the Trump Era. *Sociology Mind*, 316 - 349.
- Meyers, E. (2000). Theories of International Immigration Policy - A Comparative Analysis. *International Migration Review*, 34(4), 1245-1282.
- _____. (2004). *A Theory of Immigration Policy*. *International Immigration Policy*.
- National Immigration Forum. (2020, 12 01). National Immigration Forum. Retrieved 12 29, 2023, from *Explainer: The Trump Administration's New Rules Restricting H-1B Workers*: <https://immigrationforum.org/article/explainer-the-trump-administrations-new-rules-restricting-h-1b-visas/>
- Rogers, E. (2015, February 12). The Insiders: Why is immigration so hard for republicans to get? Retrieved from *The Washington Post*: <https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/02/12/the-insiders-why-is-immigration-so-hard-for-republicans/>
- Taufik, S. A. (2021). American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran Ke Amerika Serikat. *Intermestic Journal Of International Studies*, 06(1), 221-241.
- Thontowi, J. (2018). Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 369-392.
- Torres, N. (2017, May 4). *Harvard Business Review*. Retrieved from *The H-1B Visa Debate, Explained*: <https://hbr.org/2017/05/the-h-1b-visa-debate-explained>
- U.S Citizenship and Immigration Services. (2017). *Number of H-1B Petitions Fillings FY2007-FY2017*. Department of Homeland Security. Maryland: Department of Homeland Security. Retrieved 11 21, 2023